



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.1/ 25 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pembahasan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

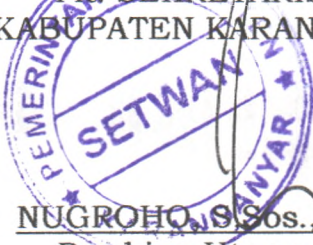
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya
PIA SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,



NUGROHO, S.Sos., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199001 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.1/ 25 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/ PEMRAKARSA	TARGET PENYAM PAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NAS- KAH AKA- DE- MIK	PENJE- LASAN/ KETE- RANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENYELENGGA RAAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK	Pengaturan tentang kesehatan bayi dan anak yang berkaitan dengan kesehatan, gizi dan lingkungan di Kabupaten Karanganyar	Baru		2025	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2025	1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2.	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA	1. Perubahan persyaratan calon perangkat desa 2. Perubahan hak perangkat desa		Ubah	2025		Penjelasan	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Inspektorat Daerah	2025	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	1. Perubahan tugas dan kewenangan kepala desa 2. Perubahan ketentuan pembentukan komposisi anggota Badan Permusyawaratan Desa 3. Perubahan masa kerja Badan Permusyawaratan Desa 4. Perubahan hak anggota Badan		Ubah	2025		Penjelasan	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Inspektorat Daerah	2025	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Permusyawaratan Desa								
4.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN DESA DAN KERJA SAMA DESA	1. Penambahan tujuan pembangunan desa 2. Perubahan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa		Ubah	2025		Penjelasan	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Inspektorat Daerah	2025	Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik daerah 2. Pengecualian penjualan barang milik daerah dalam hal tertentu 3. tata cara pelaksanaan pengawasan		Ubah	2025		Penjelasan	1. Badan Keuangan Daerah 2. Inspektorat Daerah	2025	Tindak Lanjut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dan pengendalian atas barang milik daerah 4. Sewa untuk barang milik daerah dengan karakteristik/sifat khusus; dan 5. Tata cara penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas kepada Pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD dan Pegawai ASN tanpa melalui lelang.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025- 2029	Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja perangkat daerah	Baru		2025	NA		1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang- an 2. Seluruh Perangkat Daerah	2025	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	RENCANA INDUK PENGEMBANG- AN KEPARIWISATA- AN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026- 2036	1. Arah pengembangan kepariwisataan 2. Dasar pembangunan Pariwisata; 3. Pemanfaatan tata ruang pariwisata 4. pembangunan daerah tujuan wisata 5. Pembangunan struktur ruang kewilayahan 6. pemasaran pariwisata 7. pengembangan produk wisata 8. pengembangan Pasar wisatawan 9. pengembanga industri dan investasi pariwisata.	Baru		2025	NA		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2025	Mencabut Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	PENYELENGGA- RAAN KETENTERAM- AN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pengaturan tentang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan umum bagi masyarakat	Baru		2025	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2025	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	PENYELENGGA- RAAN PENANAMAN MODAL	1. Pengembangan iklim penanaman modal 2. Promosi penanaman modal 3. Pelayanan penanaman modal; 4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 5. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; 6. Pembinaan dan pengawasan penanaman modal 7. Pengenaan sanksi 8. Kewenangan dan kebijakan daerah sesuai dengan visi dan misi RKPD dan arah kebijakan	Baru		2025	NA		1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan	2025	Mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kepala Daerah yang baru 9. Kerjasama 10. Pengembangan sistem informasi penanaman modal 11. Penyebarluasan, Pendidikan dan pelatihan 12. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal 13. Pelaporan dan evaluasi 14. Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat 15. Pengaduan pelaku usaha 16. Informasi data potensi dan peluang penanaman modal						Sumber Daya Mineral		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025- 2045	1. Visi misi pembangunan daerah 2. Tujuan pembangunan industri kabupaten 3. Sasaran pembangunan industri kabupaten 4. Strategi pembangunan industri; 5. Program pembangunan industri (penentuan industri unggulan, pengembangan sarana dan prasarana industri, pembangunan sumber daya manusia industri	Baru		2025	NA		1. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2025	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
11.	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	Perubahan Tipe Diskominfo dari Tipe C menjadi Tipe B		Ubah	2025		Penjelasan	1. Bagian Organisasi Setda 2. Dinas Komunikasi dan Informatika	2025	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

DAFTAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/PEMRA-KARSA	TARGET PENYAM-PAIAN
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	Baru		2025		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Oktober
		b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan		Ubah	2025		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Juni
		c. Pertanggungjawab-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Baru		2025		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Maret

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindakanjuti putusan Mahkamah Agung.							

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

BAGUS SELO

Salinan sesuai dengan aslinya
PE. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR,



NUGROHO, S.Sos., M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 199001 1 001